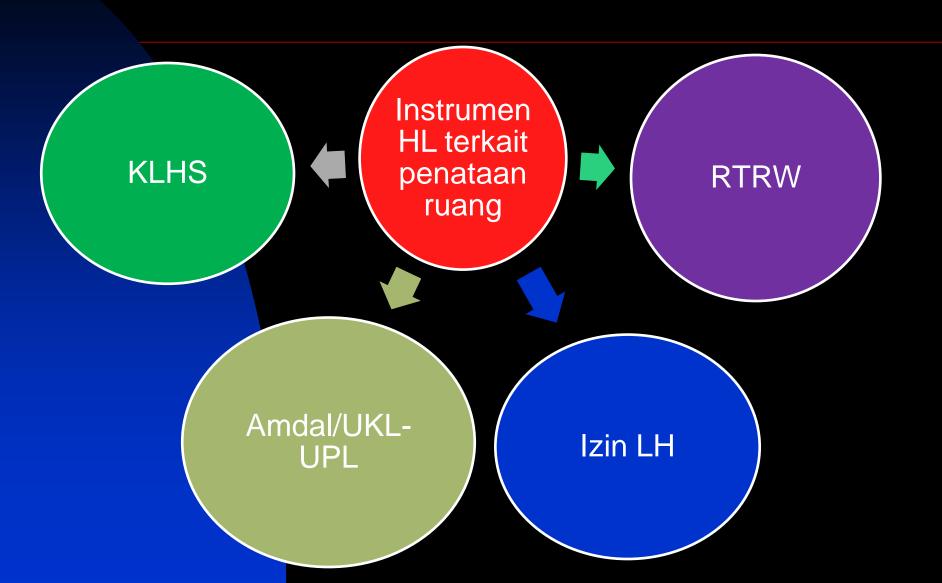
PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Bagian 2)

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Materi Kuliah ke-10 Hukum Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020

INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT PENATAAN RUANG



TATA RUANG DAN KLHS

Pasal 19 (1) UUPPLH-2009:
Untuk menjaga kelestarian fungsi
LH dan keselamatan masyarakat,
setiap perencanaan tata ruang
wilayah wajib di dasarkan pada
KLHS

PENGERTIAN KLHS

KLHS ADALAH
RANGKAIAN ANALISIS YANG
SISTEMATIS, MENYELURUH, DAN
PARTISIPATIFUNTUK MEMASTIKAN
BAHWA PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TELAH MENJADI
DASAR DAN TERINTEGRASI DALAM
PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH
DAN/ATAU KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM

INTI KAJIAN DI DALAM KLHS

1

 PENGKAJIAN PENGARUH KRP (Kebijakan Rencana&Program) terhadap kondisi LH suatu wilayah (tata ruang, RTRW,RPJP/RPJM)

2

 PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

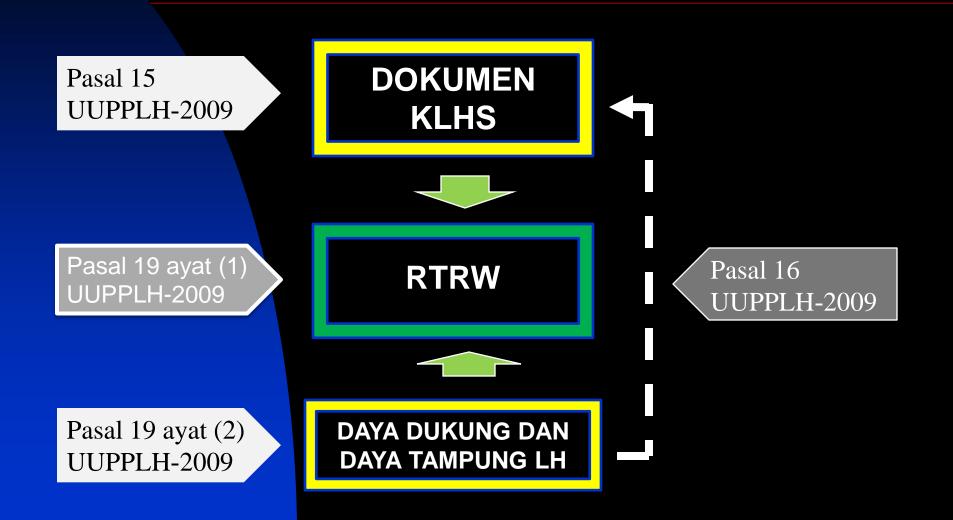
3

 REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

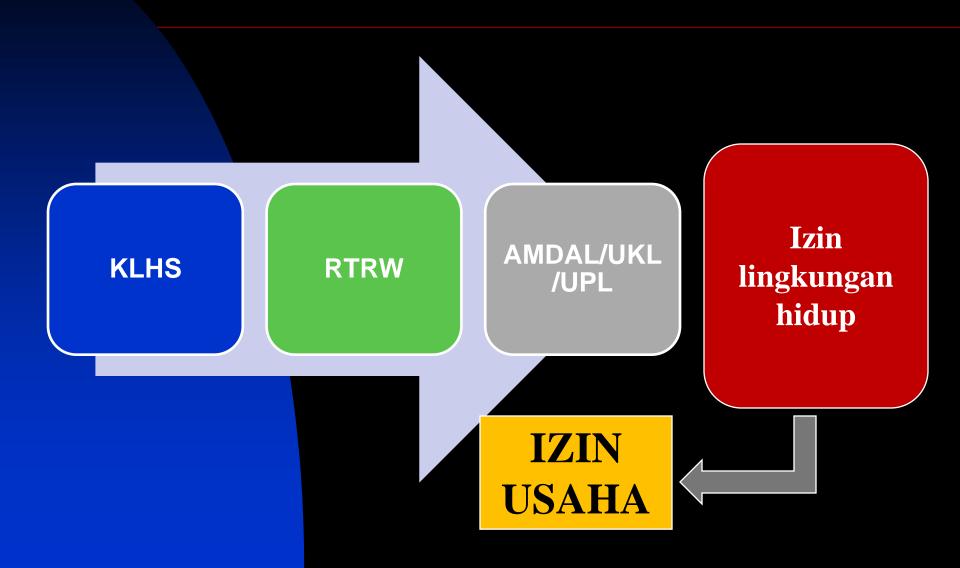
KLHS MEMUAT KAJIAN ANTARA LAIN:

- KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH.
- PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH
- KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM
 - Hulu hilir
 - Insentive dan disinsentive
 - PES Payment Environment Service
- EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
- TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
- TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

KETERPADUAN KLHS DAN TATA RUANG

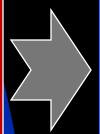


IZIN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG

Izin lingkungan hidup



izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG

PENERBIT
ANNYA
WAJIB
MEMPERH
ATIKAN

